

PLURALISME MASYARAKAT TANIMBARKEI TINJAUAN SOSIO-ANTROPOLOGIS

THE PLURALISM OF TANIMBARKEI COMMUNITY A SOCIAL-ANTHROPOLOGICAL REVIEW

Mezak Wakim

Balai Peletarian Nilai Budaya Ambon
Jl. Ir M. Putuhena Wailela Poka Rumahtiga Ambon
Pos-el: wakimmeca@gmail.com

Abstrak

Tanimbarkei merupakan sebuah pemukiman di pulau kecil dan terisolir di Kabupaten Maluku Tenggara. Bagi masyarakat Tanimbarkei menjalankan ajaran *mitu* (leluhur) merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang di percaya akan membawa dampak bagi kebaikan bersama. Sehingga masyarakat Tanimbarkei begitu memegang teguh ajaran leluhur. Penelitian ini lebih di fokuskan pada kebersamaan menjalankan ritual adat dengan tetap mengharagi perbedaan agama yang ada. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menghimpun data yang membahas lebih jelas pada konsep pluralisme masyarakat Tanimbarkei dalam pendekatan budaya masyarakat Tanimbarkei. Maluku mesti belajar dari Tanimbarkei dalam mengelola aspek perbedaan sebagai perwujudan kekuatan bersama.

Kata Kunci : Pluralisme, tradisi dan interaksi masyarakat

PENDAHULUAN

Membicarakan istilah *Pluralisme*¹ dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, sesungguhnya referensi penting yang dicatat adalah hubungan antara negara dengan agama. *The Free Encyclopedia* pada *Entry Religious Pluralism* dituliskan bahwa Pluralisme yang menunjuk pada perbedaan agama secara mudah adalah istilah bagi hubungan-hubungan damai antara beragam agama atau sebaliknya pluralisme agama menggambarkan pandangan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya dan secara eksklusif menjadi sumber kebenaran, dan karenanya pluralisme agama meyakini bahwa kebenaran itu tersebar di agama-agama yang lain.

Argumentasi ini kemudian oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengartikan *pluralisme* agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanyalah yang benar sedangkan yang lain salah. *Pluralisme* juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga dan akan hidup berdampingan di dalam sorga kelak. Dominasi kekuatan yang mengatasnamakan

agama menjadi konsekwensi dari rujukan yang tidak pernah menemukan unsur agama sebagai rangkaian dari keberagaman yang pantas di kelolah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep ini kemudian menjadi pergumulan bangsa Indonesia dalam mengelolah isu perbedaan paling mendasar yakni kepercayaan yang berhubungan dengan agama-agama yang ada di Indonesia sebagai wujud dari integrasi kebangsaan menjadi ke-Indonesian. Gagasan Dialog antar pemeluk agama yang dimunculkan dengan topik *Toleransi* menjadi produk budaya Indonesia ketika otoritas pemerintahan pada masa Orde baru terkonstruksi secara politis. Konsekwensi dari tidak mengakar tradisi gagasan Orde Baru ini dapat dilihat pasca runtuhnya rezim Soeharto 1998.² Indikator keberagaman yang dirangkul dengan istilah *Toleransi* antar pemeluk agama di Indonesia kini menjadi perbincangan dunia Internasional akibat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pertikaian antar etnis dan agama muncul di mana-mana roh *Toleransi* hilang, peradaban bangsa yang dibangun diatas fondasi ke-bhinekaan seakan tidak berdaya melera

pertikaian yang kian memanas. Sebut saja peristiwa di Ketapang, Kupang, Sambas, Sampit, Papua, Aceh, Posso, dan Maluku.

Titik awal pemicu konflik dimulai sejak krisis ekonomi, ideologi, dan politik yang berujung pada ketidak harmonisan berbagai struktur sosial dalam tatanan masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menempatkan koreksi kesalahan orde baru yang telah menempatkan negara dalam posisi lemah dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu melakukan tindakan anarkisme. Idealnya bahwa konflik muncul dari ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran, ketidakadilan dan perbedaan argumentasi kebijakan yang mengatasnamakan publik, kekerasan sosial, dan sentimen etnik, agama dan ras.

Corak pendekatan ini selalu muncul ketika perjuangan individual maupun kolektif dengan mengusung tema-tema representatif tentang masyarakat, etnis, dan agama tertentu dengan mengedepankan kekerasan. Kekerasan seolah-olah merupakan jalan pintas untuk mendemonstrasikan pendapat, namun tentu konflik akan selalu mendatangkan kehancuran.³ Bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman (pluralitas) agama, pluralisme sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Ia mampu menjadi wahana dan sarana membangun ke arah kehidupan yang maju, damai dan sejahtera.

Namun jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana maka pluralitas akan menjadi salah satu faktor pemicu konflik, disharmoni dan disintegrasi bangsa. Konsep Bhineka Tunggal Ika sejatinya lahir sebagai refleksi atas kemajemukan bangsa, sekaligus sebagai jawaban agar kemajemukan itu tidak memicu disintegrasi, tapi justru menjadi pilar penyangga hadirnya sebuah bangsa yang kokoh. Konstelasi politik dalam satu dekade terakhir ini kita menghadapi beberapa tindakan kekerasan yang mengatas-namakan agama. Sebut saja peledakan Gedung Atrium Senen (1-12-1998), Plaza Hayam Wuruk (15-4-1999), Gereja GKPI Medan (28-5-2000), Bom Bali II (1-10-2006); merupakan estimasi yang menandai rapuhnya "keakraban" hidup umat beragama. Tindakan kekerasan atau dorongan apapun dengan menggunakan simbol agama, secara implisit

maupun eksplisit terus merebak dan menguat, dan hampir ditemukan dalam semua agama dan paham-paham keagamaan.

Relevansi antara konflik Maluku dengan Tanimbarkei yang di bicarakan pada penelitian ini adalah munculnya sebuah gagasan penting yang dirujuk dari kearifan lokal dalam mempertahankan aspek kebudayaan sebagai warisan leluhur. Haryati Soebadio⁴ mengidentifikasi hal ini sebagai *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya dari suatu komunitas yang menyebabkan komunitas tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Moendardjito⁵ mengatakan bahwa unsur budaya sebagai *local wisdom* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.

Ciri-cirinya adalah: (1). Mampu bertahan terhadap budaya luar (2). Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar (3). Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli (4). Mempunyai kemampuan mengendalikan (5). Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Pada dua pandangan ini tentu di kaitkan dengan keberadaan Tanimbarkei sangatlah tepat karena pada eskalasi konflik Maluku yang melibatkan intervensi agama-agama, Tanimbarkei sama sekali luput dari permasalahan ini. Sehingga boleh dikatakan bahwa konflik Maluku dengan tingkat eskalasi yang begitu tinggi, yang melibatkan seluruh wilayah di Maluku maupun Maluku Utara, masyarakat Tanimbarkei tetap teguh pada konsep kearifan lokal sebagai pedoman hidup. I Ketut Gobyah⁶ juga menjelaskan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Karena kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Landasan teori ini menguatkan rujukan budaya lokal

Tanimbarkei sebagai cara tersendiri bagi kehidupan kebersamaan.

Sehingga penelitian ini kemudian menjadi menarik ketika Tanimbarkei di munculkan sebagai gagasan baru melalui budaya lokal yang di pertahankan dan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Maluku pada umumnya. Sebuah pulau kecil yang terisolir mungkin saja tidak pernah menikmati kemajuan IPTEK namun kini telah mencatat perestasi gemilang dalam mengelola perbedaan sebagai kekuatan membangun peradaban di wilayah Tanimbarkei.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi yang berupaya memahami aspek ruang dialog dan interaksi antar agama-agama di Tanimbarkei dengan mengacu pada konsistensi budaya warisan leluhur. Sehingga metode penelitian lebih pada pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan rujukan antara lain : *Observasi* : Cara ini dipandang penting agar peneliti dapat memperoleh gambaran jelas mengenai wilayah-wilayah yang ada di Tanimbarkei dengan persebaran komunitas pendukung agama yang berbeda-beda. *Wawancara* : Wawancara **berstruktur** : Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data inti namun bersifat permukaan seperti masalah gambaran umum tentang Kepulauan Tanimbarkei yang berkaitan sistem sosial dan kedudukan hukum adat yang berlangsung dalam mekanisme sosial budaya masyarakat Tanimbarkei.

Wawancara **mendalam**: Teknik ini ditempuh dengan tujuan agar data permukaan yang diperoleh melalui wawancara berstruktur dapat didalami materinya secara detail lagi, sehingga gambarnya menjadi lebih jelas dan komperhensif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara mendalam ini digunakan khusus mengcover data-data yang berkaitan dengan proses interaksi antaragam sebagai bagian dari cara mengelola perbedaan yang ada dalam tatanan sosial budaya Tanimbarkei.c) *Studi Dokumen* : Studi dokumen dimaksudkan sama seperti dalam penelitian ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Tetapi dimaksudkan hanya untuk mendapatkan data-data resmi dari pihak pemegang otoritas di wilayah kajian yang meliputi *Ohoi/Kampung Tanimbarkei* sebagai wilayah yang luput dari

pengaruh konflik sosial yang melanda Maluku 1999. *Studi Kepustakaan* : Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan teoritik dan studi tentang pluralisme agama di Indonesia, serta referensi mengenai konflik komunal di Maluku. Analisa data dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir kegiatan penelitian. Data yang disusun dan digolongkan kedalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pada pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan. Selanjutnya setelah diadakan interpretasi-interpretasi dan penjelasan-penjelasan yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Deskriptif tersebut diperhadapkan akan dapat memberikan penjelasan atau pemahaman tentang kompleksitas gejala-gejala yang tercakup dalam focus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TANIMBARKEI DAN EKSISTENSI BUDAYA LOKAL

Belum hilang dalam ingatan masyarakat Maluku tentang catatan kusam yang pernah terjadi di Maluku pada dekade 1999. Generalisasi konflik benuansa SARA yang berlangsung tentu memberikan efek dan pencitraan buruk terhadap eksistensi budaya lokal yang sering dipromosikan sebagai bentuk dan proses belajar dari daerah lain di Indonesia.⁷ Tanimbarkei begitu tidak populer dalam ingatan masyarakat Maluku apalagi bila didekatkan pada konsep geografis, namun dalam perspektif budaya tentu memberikan sebuah pertimbangan mendasar yang menunjuk pada kompleksitas budaya lokal yang begitu kokoh di tengah prahara sosial yang membara dengan mengusung tema agama sebagai jalan kekerasan sosial. Eksistensi budaya lokal dipertarukan, rasio kelokalan yang muncul tidak mampu mempertahankan derajat kemanusiaan di Maluku.

Akan tetapi Tanimbarkei yang muncul dari ketenaran budaya lokal dapat mempertahankan budaya tradisi dalam mengelola kekayaan budaya leluhur untuk masa depan Tanimbarkei yang lebih baik. Konspirasi konflik dengan mengusung tema agama tidak begitu mudah mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat Tanimbarkei karena masyarakat begitu menempatkan kebudayaan tradisi sebagai produk hukum yang mengatur segala

sesuatu yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan.

*Hanik Ne Hanik dan Hukum Adat Kotfit*⁸ merupakan gagasan kelokalan yang mampu membuat prestasi cemerlang bagi masyarakat Tanimbarkei dalam mengelola pluralitas masyarakat. Dominasi Hindu tidak memberikan perbedaan sempit dalam tatanan masyarakat Tanimbarkei karena masyarakat selalu menempatkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari pemahaman ajaran agama masing-masing pemeluk.

Dogma agama yang menunjuk pada kekerasan yang mengatasnamakan agama yang berlangsung dalam konsep masyarakat multikultur tentu terbailik dengan pendekatan budaya masyarakat Tanimbarkei yang memahami agama sebagai unsur penanda sosial yang diperoleh dari argumentasi keberagaman yang dikelola dengan baik dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat. Menurut Rudy Tabalubun seorang tokoh Hindu di Tanimbarkei menegaskan bahwa orang Tanimbarkei tidak pernah memikirkan bahwa ada konflik yang terjadi di Kepulauan Kei misalnya dan Maluku pada umumnya yang melibatkan agama-agama, namun kami hanya berfikir bagaimana membantu saudara-saudara baik Islam maupun kristen yang mengalami konflik sosial tersebut. Kami (masyarakat Tanimbarkei) tidak pernah melibatkan diri dalam konflik yang berlangsung di Kepulauan Kei. Adat menjadi kekuatan kami untuk saling menjaga dan memelihara perdamaian di Tanimbarkei.

Belajar dari pengalaman Tanimbarkei tentu *Tore Linholm*⁹ menegaskan bahwa kebebasan beragama yang didekatkan pada konsep masyarakat tradisi adalah model pengetahuan lokal yang menerima satu kenyataan bahwa masyarakat kita adalah *masyarakat plural*. Yaitu masyarakat yang dibedakan oleh hadirnya secara bersama berbagai agama dan pandangan hidup yang berbeda. Korelasi konsep ini telah menunjuk pada sebuah konteks sosial budaya yang perlu di pahami sebagai pola manajemen sosial yang diterapkan masyarakat Tanimbarkei dalam menunjukan sebuah persamaan persepsi bahwa semua manusia adalah memerelukan kebebasan dan kodrat yang sama. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kebudayaan lokal antara lain :

- 1) *Yaanuar* : konsep hidup orang bersaudara. Implementasi lebih pada sebuah keyakinan bahwa masyarakat Tanimbarkei secara keseluruhan baik yang beragama Hindu, Protestan, katholik dan Islam adalah juga merupakan satu kesatuan masyarakat yang dilindungi oleh adat dan tradisi masyarakat Tanimbarkei.
- 2) *Rarbet for Maad* : model hidup yang saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Kebudayaan yang dipengaruhi oleh ajaran agama masing-masing sangat perlu di pahami bersama sehingga tidak ada perbedaan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat.
- 3) *Hani ne Hanik* : sebuah rekomendasi atas kepemilikan yang menunjuk pada individu maupun kelompok yang menegaskan kamu ada kamu dan aku adalah aku. Representasi unsur kebersamaan yang menghargai perbedaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan agama dan lainnya. Bahwa konsep ini begitu kuat dalam masyarakat Tanimbarkei. Keekerabatan yang diatur dalam hal pengelolaan sumberdaya alam pun juga di selaraskan dengan kepemilikan yang bisa diatur untuk kepentingan bersama.

Tujuan hakiki dari pengalaman Tanimbarkei dalam menempatkan tradisi lokal sebagai gagasan permanen dalam mengelola pluralitas masyarakat tentu akan menjadi rujukan paling berharga bagi masyarakat Maluku dalam melihat perbedaan sebagai bagian dari konsepsi memperkuat jati diri masyarakat. *Dieter Barlels*¹⁰ antropolog budaya Universitas Yavapai College Arizona AS memberikan sebuah argumentasi tentang konflik komunal di Maluku sebagai model kerusakan hubungan antaragama di Maluku.

Hal ini lebih dilihat sebagai munculnya ketidakseimbangan kelompok Kristen dan Islam dalam komposisi birokrasi pemerintahan. Namun lebih daripada itu Bartles melihat konflik sosial di Maluku sebagai fenomena dari tidak stabilnya nilai budaya lokal sebagai gagasan masyarakat tradisi yang dikembangkan di Maluku. Konteks persamaan dalam kebudayaan masyarakat Tanimbarkei lebih melihat komposisi dan dominasi sebagai konteks yang perlu di perhatikan. Hal ini

tercermin dalam kehidupan masyarakat yang kini merupakan kesepakatan leluhur yang telah ada dan dijalankan hingga kini. Dalam mengisi struktur pemerintahan misalnya harus beragama Hindu dan ketentuan ini telah ada semenjak dahulu kala, namun tetap dijalankan dengan berdasar pada ketentuan tradisi. Katholik, Protestan, Islam juga menepati posisi yang sama dalam struktur pemerintahan, dengan demikian kecemburuan sosial terhadap kedudukan dalam masyarakat tidak merupakan referensi yang berlaku dalam masyarakat Tanimbarkei.

Pengalaman Tanimbarkei dalam perspektif konflik Maluku, maka pengalaman ini menunjukkan sebuah ketertarikan secara tradisi dalam mengelola kunci kehidupan beragama di Maluku. Tanimbarkei walaupun jauh dari pusat modernisasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kecerdasan dalam mempertahankan kebudayaan lokal sebagai wujud dari ekseistensi masyarakat Tanimbarkei dalam melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, atau melihat agama lain sebagai bentuk dari dominasi terhadap komunitas tertentu namun lebih daripada itu melihat perbedaan ini sebagai wujud pluralitas masyarakat yang memperindah harmonisasi hidup masyarakat Tanimbarkei. Tidak terbayangkan masyarakat Islam yang hidup di Tanimbarkei dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, padahal konflik Maluku yang berujung pada pertikaian antar agama yang melibatkan Islam dan Kristen tentu mempertimbangkan komunitas Islam yang hidup diantara dominasi masyarakat non muslim yang terlibat dalam pertikaian.

Kekokohan budaya lokal lagi-lagi menjadi sandingan mutlak bagi terciptanya kehidupan masyarakat Tanimbarkei yang damai dan sejaterah. Catatan eksistensi budaya lokal Tanimbarkei menjadi pengantar bagi menelusuri lebih mendalam mengenai konsep pluralisme menurut masyarakat Tanimbarkei di Kabupaten Maluku Tenggara.

PENERAPAN TRADISI RELIGI : REFLEKSI HUBUNGAN ANTARGAMA DI TANIMBARKEI

Sejarah agama-agama, atau lebih tepatnya sejarah sosial keagamaan yang menunjukkan bahwa struktur-struktur internal dari agama-agama tersebut baik institusi ajaran, kegiatan misi kepemimpinan) telah melahirkan

berbagai potensi konflik diantara agama-agama. tidak bisa dipungkiri, bahwa konteks masa lalu, menunjukkan bahwa konflik-konflik antar agama acapkali terjadi dipicu oleh perbedaan doktrin yang terpelihara sebagai keyakinan absolut.¹¹ Sudah tentunya juga perlu diakui bahwa faktor diluar benturan konflik agama juga terjadi karena adanya faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan menjadi bagian penting dalam melihat ketersambungan sebuah konflik yang seringkali mengganggu hubungan antar agama.

Dalam pejabaran hubungan antar agama tentunya pendekatan Antropo-religius pada dasarnya mendasari hubungan interaktif antara pendekatan antropologi dengan agama. Dalam konteks ini antropologi menunjuk pada orientasi budaya sebagai jembatan dalam menghubungkan agama sebagai jalan menuju sebuah kesepakatan yang damai. Sehingga *Clofford Gerets* dalam *Rumahuru* mempertemukan konsep antropologi budaya tentang kehidupan Jawa, Ia melihat agama sebagai fakta budaya saja; bukan semata-mata sebagai ekspresi kebutuhan sosial atau ekonomi (meskipun hal-hal ini juga mesti diperhatikan) melalui simbol, ide, ritual adat kebiasaanya.

Akan tetapi *Th Sumartana*¹² melihat gejala sosial yang merupakan fenomena dari keterputusan hubungan antar agama-agama lebih disudutkan pada kesenjangan ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum. Representasi komponen yang disebutkan ini tentu menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia dalam melihat sejarah hubungan-antar agama-agama yang berlangsung selama orde baru. Banyak sejarawan, pemerhati budaya, LSM dan lembaga keagamaan lainnya mengometari konflik antar agama sebagai kegagalan dari rezim orde baru.

Diskriminasi etnis dan agama kemudian dijadikan sebagai alat kontrol penguasa dalam mendesain beragam konflik yang menunjuk pada SARA (suku, agama dan ras) sebagai alternatif yang menguntungkan dalam komposisi politik yang diembanya. Semua penerapan ini adalah bagaimana memutuskan sebuah kepentingan dan dialog antar agama yang telah berlangsung dengan baik. Gagasan untuk hidup dengan damai kemudian mengatifkan kembali dialog antar agama tidak

mungkin lagi berjalan dengan baik dalam negara kesatuan Republik Indonesia selama dominasi yang menentukan konsep *majoritas* dan *minoritas* masih menjadi referensi dalam sistem perpolitikan bangsa Indonesia. Penghargaan terhadap konsep hakiki dari kepercayaan dan kebebasan beragama adalah mutlak diberikan oleh negara, akan tetapi dalam konteks ini banyak sudah ketelodoran yang digarap negara melalui alat-alat penguasa negara yang merugikan falsafah bangsa yang menghargai keberagaman yang ada. Sebut saja konflik Maluku 1999 sebuah kategori konflik sosial yang paling terparah dalam dekade konflik antar agama di Indonesia.¹³ Kekayaan budaya yang diwariskan oleh leluhur dalam menjaga hubungan antar agama melalui berbagai ritual adat dan beragam filosofis yang menyatukan perbedaan tidak lagi menjadi kekuatan dalam membangun dialog antar agama yang berlangsung. Inisiatif damai yang diperoleh dari gagasan *local wisdom* menegaskan bahwa konflik adalah bukan merupakan tradisi orang Maluku akan tetapi kesenjangan yang didapat dari ketidaksabihan dan kekokohan budaya lokal dalam membendung bergai gejolak yang datang. Merujuk pada permasalahan ini maka konsep damai yang telah dibangun leluhur Islam dan Kristen sebagai warisan masa lalu tidak lagi dipakai sebagai model mediasi dialog antar agama.

Memaknai logika dalam melihat hubungan antar agama-agama di Maluku kini kembali melihat Tanimbarkei sebagai pokok panduan yang masih berpegang pada kepentingan tradisi dalam mengelola hubungan antar agama-agama yang ada. Ikatan-ikatan tradisi yang memperkuat relasi sosial antar individu pemeluk agama yang berbeda menjadi sebuah model memacu konsep hubungan yang lebih besar. Dalam konteks hidup *orang basudara* yang diperagakan dalam kebudayaan Maluku ternyata juga berlaku dalam tradisi kehidupan masyarakat Tanimbarkei. Istilah *Bib Laar* yang diperkuat dengan satu pemahaman bahwa mereka (agama-agama yang ada) merupakan satu kesatuan geonologis (satu keturunan) yang dipersatukan dalam *ohoi* Tanimbarkei. Pendekatan ini kemudian muncul berbagai partisipasi ritual religi yang diperankan sebagai model dialog antar agama-agama di Tanimbarkei. Konsep tersebut antara

lain berlaku pada upacara-upacara keagamaan besar yang melibatkan tiga komunitas besar yang ada di Tanimbarkei. Kontribusi yang menunjuk pada tenaga, moral dan lainnya terhadap suksesnya sebuah acara keagamaan yang berlangsung dalam kehidupan keberagaman di Tanimbarkei. Munculnya gagasan untuk menghargai pluralitas dan membangun dialog antar agama yang ada merupakan ketentuan dasar dari sebuah kesepakatan yang ada karena masyarakat begitu meyakini adanya Adat dan agama sebagai bentuk dari keterpaduan unsur budaya Tanimbarkei. Realitas dari hubungan antar agama di Tanimbarkei dapat ditunjukkan melalui :

a) Hari Raya Nyepi

dimana konsep dan partisipasi antar agama Kristen dan Islam serta Katholik bertugas sebagai tuan rumah dimana tidak ada perbedaan antara agama-agama yang ada. Masyarakat *Mun* yang beragama Islam menyiapkan makanan disesuaikan dengan bentuk kepercayaan. Pada bentuk perayaan ini semua tokoh agama dari semua agama yang ada di Tanimbarkei berkumpul dan merayakan bersama Hari Raya Umat Hindu di Tanimbarkei. Menurut Rudy Tabalubun dalam perkumpulan selama kegiatan perayaan Neyepi tidak ada sama sekali perbedaan antara Islam, Kristen, Hindu dan lainnya.

Masyarakat Tanimbarkei ada dalam sebuah kebersamaan dalam membangun hubungan antara agama-agama yang ada di Tanimbarkei. Dan tradisi ini memberikan satu pemahaman penting dalam kehidupan masyarakat Tanimbarkei bahwa agama Hindu adalah juga merupakan bagian dari agama yang dapat menyatukan keberagaman seluruh masyarakat Tanimbarkei. Islam dan Kristen yang dipahami selama ini sebagai agama yang menghargai perbedaan agama lain adalah mutlak dipertimbangkan dalam kebudayaan masyarakat Tanimbarkei.

b) Hari Raya Idul Fitri

Dalam perayaan Idul Fitri masyarakat dari agama Hindu, Kristen Katholik dan Protestan sebagai pengambil gagasan dalam melakukan silaturahmi dengan masyarakat *Mun* sebagai penganut agama Islam. Islam dipahami masyarakat Tanimbarkei sebagai agama yang menentukan hubungan persaudaraan antara Banda Eli dengan

masyarakat Tanimbarkei. Dalam perayaan ini semua masyarakat yang terdiri anak-anak dan orang tua datang bersama-sama merayakan hari raya Idhul Fitri bersama masyarakat *Mun*. Berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan perayaan Idhul Fitri juga di sediakan oleh masyarakat penganut agama lain dan tentu dalam pemenuhan kebutuhan hari raya disesuaikan dengan sistem kepercayaan masyarakat *Mun* yang beragama Islam. Saling bermaaf-maafan dibulan yang penuh dengan berkat bagi masyarakat muslim di seluruh dunia. Kebersamaan dalam membangun sebuah tali silaturahmi antar pemeluk agama melalui upacara keagamaan adalah bentuk dari menjalankan dialog yang berjalan baik disesuaikan dengan tradisi masyarakat yang berlaku. Kepentingan agama sebagaimana yang selama ini diperdebatkan dengan konsep dan doktrin yang merugikan agama lain yang dikembangkan tidak pernah terbayakan dalam komposisi budaya masyarakat Tanimbarkei

c) Hari Natal

Tradisi natal bagi agama Kristen pada umumnya merupakan bukti dari adanya janji keselamatan yang datang melalui kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia dan menebus dosa-dosa manusia. Pemaknaan 25 Desember sebagai hari natal bagi seluruh umat Kristen di dunia adalah bagian dari penganan janji Tuhan tentang akan datang penyelamat. Tradisi perayaan natal bagi umat Kristen di Tanimbarkei adalah benar-benar memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas dalam melihat efisiensi adat yang berjalan dengan baik dan memberikan penghargaan terhadap dialog agama yang ada di Tanimbarkei. Partisipasi masyarakat Hindu sebagai dominasi agama di Tanimbarkei adalah benar-benar menunjukkan sebuah harmonisasi hidup masyarakat Tanimbarkei. Pada puncak perayaan natal yang dilakukan pada posisi kampung tam (kampung bawah) dilakukan pada tengah kampung dengan model perayaan yang begitu hikmat. Doa akan dibawahkan dalam bentuk Kristen dan kemudian dilanjutkan dengan agama-agama yang lain yang terlaksana pada acara ibadah natal. Bentuk dialog yang dibawahkan antar umat beragama melalui doa yang dipanjatkan bersama-sama secara bergiliran

tentu memberikan pemahaman yang paling mendasar dari kebersamaan masyarakat Tanimbarkei dalam membangun hubungan antar agama yang telah ada dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Tanimbarkei.

Beberapa bentuk dari konsep tradisi religi masyarakat Tanimbarkei yang berjalan dengan baik tentu telah memberikan sebuah pembelajaran penting dalam mengelola perbedaan agama yang paling fundamental dalam masyarakat. Gejolak sosial yang muncul dengan mengatsanamakan agama akan dengan mudah ditepis dengan berbagai pendekatan. Karena kekuatan yang selama ini dibangun dengan pendasaran tradisi keagamaan yang berlangsung dengan baik akan menjadi penting bagi masyarakat Tanimbarkei. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, maka dapat dideskripsikan mengenai hubungan antar agama yang ada di Tanimbarkei dapat berjalan dengan baik sejalan dengan apa yang didambakan masyarakat Tanimbarkei. Konflik sama sekali tidak pernah terjadi akibat konflik agama, walaupun ada namun dapat dieliminir dengan baik oleh adat yang berlaku dalam masyarakat. Konsep agama telah mencatat beberapa peristiwa bagi masyarakat Tanimbarkei yang kini dijadikan sebagai model dan cara dalam menagani berbagai permasalahan mendasar dalam masyarakat.

TAT'TEE RITUAL ADAT :TRADISI YANG MENYATUKAN

Dalam konsep tradisi kebudayaan masyarakat Tanimbarkei, upacara *ta'tee*¹⁴ merupakan jenis ritual adat yang paling tertua dalam kebudayaan masyarakat Tanimbarkei. Hal ini sangat mempertimbangkan unsur budaya yang muncul dalam sejarah pembentukan *Oho/ kampung Tanebar evav* Tanimbarkei. *Tat'tee* didefinisikan sebagai sebuah upacara tradisi yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat Tanimbarkei yang berkaitan dengan ritual adat pembukaan lahan baru untuk penanaman *hotong* sebagai kontribusi pangan lokal bagi masyarakat Tanimbarkei. Dalam sejarah pembentukan *Ohoi /kampung* Tanimbarkei muncul *hotong* sebagai bagian dari kontribusi pembentukan Tanimbarkei. *Hotong* dan tradisi *Tat'tee* dalam kebudayaan Tanimbarkei sebagai model

dari gagasan leluhur yang menempatkan Tanimbarkei pada posisi yang begitu kuat dengan sistem kepercayaan tradisi.

Dalam komposisi budaya Tanimbarkei upacara ritual *Tat'tee* tentu berkaitan dengan upacara suci yang begitu dimaknai sebagai media bagi masyarakat Tanimbarkei yang begitu menghargai kepercayaan terhadap leluhur. Instrumen ini kemudian menjadi menarik ketika dalam menjalankan sebuah ritual adat *Tat'tee* telah mempersatukan semua masyarakat Tanimbarkei dari seluruh agama-agama. relasi sosial yang dibangun dari upacara *Tat'tee* tentu menjadi media interaksi antaragama yang telah ada dan mendiami kepulauan Tanimbarkei.

Tat'tee dalam kepercayaan masyarakat Tanimbarkei adalah bentuk ritual awal dalam pembukaan lahan baru perkebunan *hotong* dimana prosesnya di mulai dengan ritual khusus yang dilakukan oleh marga Sarmav dan Tabalubun yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *mitu* (leluhur) bagi mereka yang begitu dituakan dalam masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Tanimbarkei *Tat'tee* dilaksanakan satu tahun hanya sekali dengan berlaku pada bulan september-Oktober dengan mempertimbangkan ritual khusus yang dilakukan oleh *Malin an kud* (tua adat) akan tetapi unsur yang paling terpenting dari upacara *Tat'tee* adalah bagaimana masyarakat Tanimbarkei akan menggumuli sebuah tradisi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Penataan terhadap konsep *Tat'tee* dalam tradisi masyarakat juga merupakan bentuk penyucian diri dimana dalam proses ini semua masyarakat dimohon agar tidak saling menyakiti dan bersilaturahmi menjaga hati dan pikiran terhadap berbagai kegiatan yang merugikan orang lain. *Tat'tee* dipahami sebagai upacara tradisi yang melibatkan semua unsur agama dengan melakukan aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan ritual adat. Tradisi yang boleh dikatakan cukup khas karena selama melakukan perburuan hewan yang dijadikan sebagai media persembahan dalam kebutuhan ritual adalah babi. Dalam konsep ajaran agama Islam dikenal babi dikategorikan sebagai hewan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Karena tentu sangat berkaitan dengan etika agama yang melarang umat untuk hal yang demikian. Akan tetapi dalam tradisi *Tat'tee* partisipasi masyarakat yang beragama Islam hanya sebatas melakukan ritual berburu babi tetap dalam

pembagian mereka tidak bisa mendapatkan bahagia. Hal sangat berkaitan dengan etika yang telah terbangun dalam tradisi masyarakat Tanimbarkei dalam menghargai masyarakat yang beragama Islam. Dari pendekatan tradisi bahwa *Tat'tee* telah menjadi media interaksi masyarakat Tanimbarkei dengan menjalankan dialog antar agama dengan baik namun tetap menghargai etika yang berlaku berdasarkan ajaran agama.

MAREN :TRADISI KERJASAMA PERWUJUDAN INTERAKSI ANTARA AGAMA

Istilah *Maren*¹⁵ (bahasa;evav/Kei) umumnya memiliki kesamaan dengan budaya gotong-royong yang mengakar dalam kebudayaan nasional; bagi masyarakat Tanimbarkei konsentrasi penggunaan istilah *maren* dimaksudkan menunjuk pada kerjasama, saling menolong,yang dilakukan karena pertimbangan kekerabatan maupun soliraritas antar kelompok masyarakat. *Marren* atau gotong royong merupakan wujud atau sikap hidup dari masyarakat Tanimbarkei yang sudah terbina sejak berabad-abad hingga kini masih tetap di pertahankan dari generasi ke generasi. Dalam konfigurasi kebudayaan masyarakat Tanimbarkei ada peristilahan *Hamare* yang artinya bakti (membagi kerja) maksudnya sesuatu pekerjaan biar seberat apapun tetap dapat dikerjakan oleh banyak orang maka dapat memberi hasil ganda baik itu kerja negeri/ohoi, pekerjaan kelompok ataupun kerja perorangan akan tetapi memberi hasil yang memuaskan, bentuk pelaksanaannya tidak sama sekali dilaksanakan dengan jaminan gaji dan sebagainya hal ini lebih pada kerelaan dalam membantu sesama yang membutuhkan. Namun dalam konsentrasi penggunaan istilah *Maren* dimunculkan kembali dengan *Hamaren* istilah yang menunjuk pada proses pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini berlaku istilah *Yang Maren* atau persiapan kegiatan yang mengatur beberapa ketentuan antara lain :

Dalam tradisi *maren* juga bermanfaat sebagai media interaksi antaragama dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan unsur gotong royong dalam masyarakat akan dilakukan dengan jalur tradisi *maren*. Kolaborasi pendekatan ini bila didekatkan pada konsep dialog antaragama maka akan terlihat jelas pada

posisi-posisi dimana *maren* dapat berfungsi dengan baik. Pembangunan Masjid Al-Jihad misalnya di dusun *Mun*, masyarakat Tanimbarkei dengan semangat dapat melakukan pembangunan secara sukarela, dengan di prakarsa oleh Hindu, Kristen Protestan, dan Katholik. Pengalaman *maren* juga terjadi pada pembangunan Pura Wuar Masbaat dimana seluruh masyarakat baik islam maupun kristen juga membantu melalui tradisi *maren*. Sebaliknya juga dengan pembangunan gereja Protestan dan Katholik.

MERAJUT MASA DEPAN MALUKU DARI PROYEKSI TANIMBARKEI: UPAYA MENGURAI “BENANG KUSUT”

Pandangan Ibnu Mujib dan Rumahuru tentang insiatif damai antara Paso dan Batumerah (wilayah yang ada di Kota Ambon) yang merepresentasikan Islam dan Kristen (agama yang bertikai dalam konflik Maluku) telah memberikan sebuah pencerahan dalam sejarah terbangunya sebuah peradaban besar di Maluku yang retak akibat konflik Maluku 1999. Perjumpaan kedua wilayah ini telah memculkan dua istilah yang sering di pergunakan orang Maluku yakni *Bakalae* (berkelahi) dan *Bakubae* (berdamai). Dua terminologi yang mengandung makna berbeda yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku pada umumnya dan Ambon pada khususnya. Tanimbarkei yang disentuh dalam pendekatan ini tentukan menjadi bentuk tradisi yang dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Belajar dari pemaknaan hidup orang *basudara* dalam kebudayaan Maluku tentu merupakan bagian dari pengalaman masyarakat Tanimbarkei dalam meleraikan berbagai gejolak sosial yang mengancam punahnya budaya tradisi. Prestasi gemilang yang diraih oleh Tanimbarkei kemudian akan menjadi proyeksi pada permasalahan penataan potensi konflik dalam masyarakat Maluku. *pluiral* dalam konteks orang *basudara* di Maluku adalah hanya melibatkan Islam dan Kristen sebagai model perbedaan mendasar, akan tetapi Tanimbarkei lebih dari pada itu. Memaknai *plural* dalam konsep masyarakat Tanimbarkei adalah semua agama yang ada dalam tatanan sosial masyarakat. Konsep damai dalam gagasan *local wisdom* (kearifan lokal) selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanimbarkei. Konsep *bakudapa* telah dipengaruhi oleh filosofi *Hanik ne Hanik*

yang memungkinkan terjadinya solidaritas antar pemeluk agama yang ada di Tanimbarkei. Kekuatan budaya lokal tentu menjadi ukuran tersendiri bagi masyarakat Tanimbarkei dalam mengelola aspek perbedaan masyarakat, *Maren* dan *yelim* bentuk tradisi Tanimbarkei yang selalu melibatkan unsur agama dalam pelaksanaan tradisi kerjasama yang dimaksudkan. Konsep damai yang dilakukan masyarakat Tanimbarkei kini harus menjadi pengalaman masyarakat Maluku dalam melihat perbedaan ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat sebagai inti dari bagaimana melihat sumber kebudayaan lokal sebagai bentuk dari posisi yang strategis dalam meleraikan konflik. Keterpaduan unsur kelokalan dalam sistem masyarakat adalah panduan mutlak bagi masyarakat Maluku. *Bakudapa* secara kultural merupakan peristiwa yang melampaui pertemuan biasa, dimana orang tidak sekedar berkumpul karena memberikan ceramah dan setelah itu selesai dan kembali tanpa memberikan sebuah pemaknaan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi sebuah rancangan momen yang mengharuskan menghidupkan pengenalan lebih dalam kehidupan orang basudara yang merepresantasi unsur agama Islam dan Kristen yang bertikai selama konflik.

Dalam perspektif budaya orang Maluku, *bakudapa* dapat dipahami sebagai proses, yang melalui sebuah bentuk transformasi baik dalam pemikiran ataupun gagasan, maupun perilaku tindakan. Melalui *bakudapa* ada tangsian penyesalan akan konflik yang terjadi yang melibatkan semua unsur yang telah banyak merugikan Maluku secara umum. Berpelukan antar sesama orang basudara, mengingat kembali masa lalu yang begitu harmonis dimana ada adik dan kak yang begitu akrab dalam satu ikatan gandong dan lainnya. Namun pertemuan yang tidak lagi melibatkan kak dan adik karena kesalahan mengelola budaya lokal yang menghargai perbedaan ini berujung pada konflik yang memberikan penderitaan. Melalui *bakudapa* akan muncul lagi istilah *beta* dan *ose* (aku dan kau), *komong* dan *dong* (kamu dan mereka) yang mengidentifikasi segregasi antara individu maupun kelompok pada masing-masing wilayah yang menunjuk pada relokasi masyarakat dengan pertimbangan aspek keagamaan. Namun dalam konsep *bakudapa* berubah menjadi *katong* (kita dan kami) kata

kita dan kami dalam proses ini tentu memberikan pemaknaan bahwa kita semua atau kami adalah satu dalam konsep orang basudara di Maluku. Makna penyatuan lokal yang telah dibentuk dari kearifan lokal yang ada sejak berabad tahun lamanya kini bangkit kembali.

Hampir diseluruh wilayah konflik membuat rekonsiliasi *bakudapa* antar sesama orang *basudara* terlihat begitu menikmati suasana konflik yang selama terjadi dengan menjadikan semangat seolah manusia bukan segalanya, kodrat manusia adalah tidak bermakna dimata konflik Maluku. Agama seolah menjadi bukti kemenangan atas individu maupun kelompok yang mengatsnamakan agama. darah dan air mata seolah tidak pernah melerai konflik yang telah banyak merugikan harta benda dan nyawa manusia yang tak berdosa di negeri raja-raja. Tangisan penyesalan dengan pelukan yang hangat antar *pela* dan gandong tidak akan merubah masa lalu menjadi pulih kembali, akan tetapi masa lalu menjadi perhatian penting dalam melihat masa yang akan datang. Dimensi ini menjadi komponen utama dalam konsep *bakudapa*, dan *bakubae* yang digagas dengan pendekatan budaya lokal akan lebih efisien dan efektif tanpa memandang konsep ini sebagai spekulasi dari kepentingan politik yang dipertontonkan dalam kebudayaan orang Maluku.

Menata pluralitas masyarakat dari konsekuensi budaya tradisi telah mengantarkan presetasi cerdas dari Tanimbarkei dalam melihat pluralitas sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan dalam masyarakat. Tatanan sosial begitu sehat dikelola dengan budaya tradisi dengan demikian semua orang bahkan semua komunitas di Maluku mestinya belajar dari Tanimbarkei. Dimana perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu di permasalahan akan tetapi menjadi unsur penyatu dalam masyarakat dan kebudayaan juga penting di makna sebagai bagian penting dalam pengelolaan sistem sosial tersebut.

KESIMPULAN

Bertolak dari penelitian dengan konten penelitian yang berkonsentrasi pada judul "*Pluralisme Masyarakat Tanimbarkei*" merupakan kajian *spesifik oriented* yang memadukan unsur pendekatan sosi-antropologi dalam melihat hubungan antaragama di Tanimbarkei Maluku Tenggara. Agama sering didekatkan pada unsur perdebatan teologis yang selama ini

dipergunakan sebagai alat pengontrol kekuasaan negara. Doktrin dan dogma agama yang sempit dalam melihat perbedaan sebagai perdebatan klasik yang bermula dari hegemoni satu terhadap yang lain dari unsur pendekatan sejarah telah membentuk opini konflik dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Beberapa konflik sosial yang mengatasnamakan agama yang terjadi di beberapa wilayah ditinjau tentu menjadi perhatian dan pertimbangan dunia atas Indonesia. Sebut saja kasus terparah dalam sejarah konflik antar agama di Indonesia yang terjadi Maluku.

Penelitian tentang *Pluralisme Masyarakat Tanimbarkei* adalah bentuk dari partisipasi sosial budaya masyarakat dalam menerjemahkan konsep *local wisdom* sebagai kekuatan dalam mengelola isu perbedaan yang ada. Belajar dari Tanimbarkei adalah mutlak menjadi pedoman penting dalam melakukan beberapa konsepsi penting dalam kehidupan orang *basudara* (dialek ambon= bersaudara/sakandung) di Maluku. Pulau Kecil yang terisolir di Kepulauan Kei Maluku Tenggara memang tidak akan pernah di hitung dalam komposisi pulau besar yang tenar dengan kepulauan berbagai aspek, namun setidaknya Tanimbarkei telah memberi sebuah ketegasan atas kearifan lokal yang di kelola untuk kepentingan bersama. Perbedaan sering di sebut sebagai model kebersamaan namun pendapat Hasim Musadi ketua NUI (Nadatul Ulama Indonesia) menyatakan dan membenarkan bahwa perbedaan bukan untuk di bedakan akan tetapi perbedaan hendaknya di kelola untuk menemukan kebersamaan bangsa yang hakiki.

SARAN

Tanimbarkei yang merupakan wilayah terisolir dan sangat jauh dari kemajuan IPTEK namun semangat menjaga keharmonisan antar masyarakat pemeluk agama yang ada setidaknya mengingatkan kita akan pentingnya kebudayaan dalam mengatasi berbagai isu perbedaan yang ada. Fakta bahwa kehidupan masyarakat Tanimbarkei yang hidup dari kekuatan tradisi telah mampu memberikan inisiatif damai secara kolektif bagi masyarakat Tanimbarkei yang begitu *plural* dari pendekatan agama. Agama telah dipahami sebagai identitas sosial yang penting dalam memajukan kebersamaan yang ada.

Pustaka

- ¹Oxford Advanced Learner's Dictionary 1995 University Press.
- ²Ibnu Mujib dan Yance Rumahuru, 2010 *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis* Jogjakarta Pustaka Pelajar.
- ³Jhon Efendi, 2011 *Pluralisme dan Kebebasan Beragama* Jogjakarta Intitit/Dian Interfidei
- ⁴Aholiab Watloly 2011, *Maluku Baru Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri* Jogjakarta Kanisius
- ⁵Bob Ohiwutun, 2010 *Nuhu Evav Hukum Adat Larvul Ngabal* (kumpulan ketentuan hukum adat Larvul Ngabal)
- ⁶Tore Linholm, 2004 *Jastifikasi Filosofis dan Keagamaan Terhadap Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*, Jogjakarta Kanisius
- ⁷Dieter Bartles, 2011 *Kegalauan Identitas, Agama. Etnisitas Kewarganegaraan pada Masa Orde Baru* Jakarta Kompas Gramedia
- ⁸Danniel Sparringa 2008 *Diskriminasi Disekelilingi Kita: Negara, Politik, Diskriminasi dan Multikulturalisme* Jogjakarta Intitit/Dian Interfidei
- ⁹Th.Sumartana 2005, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* Jogjakarta Intitit/Dian Interfidei
- ¹⁰Samuel Waleruny, 2011 *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- ¹¹Patikaihattu dkk, 1993 *Sejarah Daerah Maluku* Depdikbud Maluku
- ¹²Stenly Loupatty, 2011 *Sejarah Kota Tual* BPSNT Ambon
- ¹³Jhon M.Echols dkk, 2004 *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filasafat* (jurnal Filasafat UGM)
- ¹⁴I Wayan Suija 2005, *Sejarah Agama-Agama* Jogjakarta Intitit/Dian Interfidei
-
-